

KETIMPANGAN REGIONAL, PERTUMBUHAN EKONOMI PRO POOR, DAN KEMISKINAN DI NUSA TENGGARA BARAT

Nuning Primadianti¹, Catur Sugiyanto²

¹ Alumni program Magister Ekonomika Pembangunan UGM dan Staff BPS Provinsi NTB; ² Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM dan Ketua Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi UGM

catur@ugm.ac.id

Abstract

This study aims to examine relationship between regional disparities, poverty, and pro poor economic growth in NTB using panel data regression and GIC. As a result, inequality in terms of GDRP, APBD, population, and level of education were significantly influence poverty in NTB. By implemeting GIC, it showed that economic growth in NTB was not pro-poor, yet. The economic growth was mainly benefit the rich group of population. Furthermore, repair of motor vehicles and motorcycles sector; financial services and insurance sector; accommodation and food service sector; and wholesale and retail trade also could, in part, reduce poverty in NTB.

Keywords: *Inequality, pro poor growth, sectoral economic growth, Growth Incidence Curve.*

JEL Classification: *I3, O15*

PENDAHULUAN

Ketimpangan pembangunan merupakan salah satu masalah di Indonesia, termasuk di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). NTB merupakan provinsi dengan dua pulau besar, yaitu Pulau Lombok dan Sumbawa yang rasio gininya selalu berkisar di atas 0,3. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan distribusi pendapatan di provinsi tersebut. Tidak hanya itu, ketimpangan juga terjadi dalam hal infrastruktur, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, serta nilai investasi yang masuk antarkabupaten.

Ketimpangan yang terjadi diindikasikan berkaitan dengan berbagai variabel makro NTB. *Pertama*, tren investasi di NTB masih didominasi di Pulau Lombok. Data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB (2017a: 536) menunjukkan sepanjang tahun 2016 ada 188 rencana proyek investasi dengan rincian 118 rencana proyek di Pulau Lombok dan 70 rencana proyek di Pulau Sumbawa, 98% nilai investasi tersebut berada di Pulau Lombok. *Kedua*, perekonomian NTB ditopang oleh sektor tambang, yaitu dengan adanya PT Amman Mineral Nusa Tenggara. Ketergantungan suatu daerah terhadap sektor tambang bisa menjadikan daerah tersebut lambat perekonomiannya (Sachs dan Warner, 2001). Sektor tambang memberikan andil kepada produk domestik bruto (PDB) sebesar 20,58% atau nomor dua setelah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 20,95%. Jika hal ini berlangsung lama dapat menimbulkan fenomena *dutch disease*, yaitu pertumbuhan ekonomi yang lambat serta kemiskinan di NTB.

Terakhir, tingkat kemiskinan NTB yang masih berada dalam peringkat sepuluh besar nasional. Hasil *Susenas Maret 2016* menunjukkan angka kemiskinan NTB menduduki posisi ke-8 nasional dengan angka kemiskinan sebesar 16,48%. Angka kemiskinan di NTB semakin menurun dibanding pada periode yang sama pada tahun 2015 yaitu menduduki posisi ke-7 nasional dengan angka kemiskinan sebesar 17,1%.

Perbaikan pada ketiga variabel makro di atas, yaitu investasi, dominasi sektor tambang, dan kemiskinan nampaknya tidak akan secara otomatis mengarahkan pergerakan ekonomi makro NTB untuk mengurangi ketimpangan antara Pulau Lombok dengan Sumbawa. Perlu dilakukan suatu upaya secara terencana untuk mengurangi ketimpangan tersebut. Upaya terencana diperlukan mengingat bahwa pengalaman di berbagai tempat menunjukkan adanya tantangan untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan sekaligus. Loayza dan Rigolini (2016) menunjukkan bahwa sektor tambang di Peru memberikan *dual effect*. Efek positifnya yaitu konsumsi per kapita 9% lebih tinggi dibanding daerah nontambang, sedangkan kemiskinannya lebih rendah 2,6%. Efek negatifnya yaitu rasio gini 0,6% lebih besar dibanding daerah nontambang.

Untuk memperbaiki kesejahteraan dan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi perlu dititikberatkan pada masyarakat miskin atau *pro poor* (Kakwani dan Pernia, 2000). Strategi pertumbuhan yang *pro poor* telah diterapkan di beberapa negara seperti India tahun 1960-1964 (Ravallion dan Datt, 2001), Thailand tahun 1998-2000 (Son, 2003), Korea tahun 1990-1999 (Kakwani *et al.*, 2004), dan Italia tahun 2002-2010 (Peragine *et al.*, 2013). Selain itu, penggunaan teknologi yang padat karya (Hull, 2009) dan melacak sumber pertumbuhan secara sektoral (Warr, 2006) juga perlu untuk diperhatikan.

Peran infrastruktur menjadi salah satu kunci dalam pertumbuhan ekonomi (*World Bank*, 2017). Dalam bidang transportasi, Seetanah *et al.* (2009) menunjukkan bahwa implikasi perbaikan transportasi lebih terlihat pada perbaikan kondisi kesejahteraan penduduk miskin dibanding penduduk kaya. Hal ini diperkuat oleh hasil analisis Kwon (2001) dan Fan dan Kang (2004) untuk kasus di Cina.

Tampaknya, pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup untuk mengurangi kemiskinan (Zaman dan Ahmed, 2008). Strategi yang fokus hanya pada pertumbuhan ekonomi akan memperparah ketimpangan (Kakwani dan Pernia, 2000). Salah satu masalah yang juga harus dituntaskan untuk mengurangi ketimpangan adalah masalah pendistribusian hasil pembangunan (Son, 2007: 6). Oleh karena itu, strategi pengentasan kemiskinan harus dimulai dari pertumbuhan ekonomi yang berpihak pada rakyat miskin dan fokus pada ketimpangan (Engerman dan Sokoloff, 2005; Klasen, 2007).

Ketimpangan dapat dikurangi melalui dua saluran yaitu pajak dan subsidi (Lin, 1993). Pengurangan konsentrasi dalam rumah tangga termiskin, proporsi rumah tangga miskin, dan sejauh mana ketimpangan terkonsentrasi dalam rumah tangga termiskin juga dapat digunakan untuk mengurangi ketidaksetaraan (Filho dan Horridge, 2006). Selain itu, ketimpangan regional yang semakin melebar juga dapat diturunkan dengan peningkatan investasi, peningkatan jumlah angkatan kerja yang bekerja, bantuan pembangunan per kapita pemerintah pusat kepada daerah (Hartono, 2008), dan desentralisasi fiskal (Lesmann, 2011).

Ketimpangan dan kemiskinan yang tergolong tinggi di NTB mendorong perlunya dilakukan kajian lebih jauh mengenai keadaan ketimpangan pembangunan di NTB. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi sudah *pro poor* atau belum sehingga pengentasan kemiskinan akan lebih cepat sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 yaitu sebesar 12,25%. Selain itu, perlu juga untuk melihat sektor-sektor ekonomi yang berperan penting dalam pengurangan kemiskinan sehingga diharapkan kebijakan pemerintah fokus pada percepatan pertumbuhan pada sektor-sektor tersebut sehingga lebih cepat dalam mengurangi kemiskinan. Untuk sektor-sektor yang tidak signifikan dalam pengurangan kemiskinan juga perlu untuk diberikan kebijakan agar mendukung sektor yang lain dalam pengurangan kemiskinan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketimpangan pembangunan antarkabupaten yang terdiri dari ketimpangan PDRB, APBD, penduduk, pendidikan, dan infrastruktur terhadap kemiskinan di NTB. Lalu, untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi yang terjadi di NTB selama periode 2000-2016 sudah *pro poor* atau belum diukur menggunakan metode *Growth Incidence Curve* (GIC). Terakhir, untuk menganalisis sektor-sektor ekonomi yang mempunyai pengaruh dalam pengurangan kemiskinan di NTB selama periode 2010-2016.

Dengan menggunakan regresi data panel, penelitian ini menemukan bahwa infrastruktur berupa jalan diaspal bukan merupakan faktor yang signifikan dalam menurunkan kemiskinan di NTB. Faktor penting yang secara signifikan menurunkan kemiskinan di NTB adalah peningkatan PDRB, realisasi belanja dalam APBD, jumlah penduduk, dan pendidikan. Selain itu, melalui metode GIC, penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di NTB belum *pro poor*. Terakhir, penelitian ini menemukan bahwa sektor reparasi mobil dan sepeda motor, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, serta perdagangan besar dan eceran menjadi sektor-sektor yang secara signifikan mengurangi kemiskinan di provinsi tersebut.

Bagian selanjutnya dari penelitian ini akan disusun sebagai berikut. Bagian 2 membahas tinjauan literatur. Bagian 3 menjelaskan metode penelitian. Bagian 4 berisi hasil dan analisis, diikuti dengan kesimpulan pada Bagian 5.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kemiskinan

Kemiskinan sering kali dihubungkan hanya dengan tingkat pendapatan. Faktanya, kemiskinan juga erat berkaitan dengan aspek lain, seperti lingkungan, sosial, hingga tingkat partisipasi dan pemberdayaan dalam masyarakat. Sebagaimana digambarkan oleh *World Bank* (2000: 15), kemiskinan adalah kelaparan. Kemiskinan adalah kurang layakanya tempat tinggal. Kemiskinan adalah kondisi sakit dan tidak dapat bersekolah serta tidak bisa membaca. Kemiskinan berarti tidak memiliki pekerjaan, kemiskinan adalah ketakutan akan masa depan, hidup satu hari pada satu waktu. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, kurangnya representasi, dan kebebasan. Penduduk dapat dikategorikan miskin atau berada dalam garis kemiskinan ketika mereka tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar atau minimum, yaitu sebesar 2.100 kkal per kapita per hari ditambah dengan

kebutuhan minimum non makanan, seperti sandang, papan, transportasi, sekolah, serta kebutuhan mendasar lainnya.

Warr (2006) memberikan penjelasan tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengukur kemiskinan dari waktu ke waktu yaitu sebagai berikut.

1. Harus dibedakan antara kemiskinan absolut dengan relatif.
Ukuran kemiskinan absolut berhubungan dengan penduduk yang pendapatan atau pengeluarannya di bawah tingkat tertentu (garis kemiskinan). Kemiskinan relatif berarti ketidaksetaraan yaitu membandingkan pendapatan atau pengeluaran orang miskin dengan orang kaya atau beberapa kelompok referensi lainnya.
2. Variabel yang digunakan untuk perhitungan kemiskinan.
Indonesia menggunakan variabel pengeluaran rumah tangga untuk mengukur kemiskinan. Beberapa negara ASEAN seperti Vietnam, Kamboja, dan Laos juga menggunakan variabel pengeluaran rumah tangga untuk mengukur kemiskinan karena pengeluaran rumah tangga langsung terkait dengan tingkat kesejahteraan rumah tangga jika dibanding menggunakan data pendapatan. Thailand, Malaysia, dan Filipina menggunakan data pendapatan rumah tangga per anggota rumah tangga yang disesuaikan dengan jenis kelamin dan distribusi umur dari rumah tangga untuk menghitung kemiskinan.
3. Ukuran kemiskinan biasanya berfokus pada ukuran jumlah penduduk dengan pendapatan atau pengeluaran di bawah ambang batas yang diberikan yaitu garis kemiskinan.
4. Sumber data yang digunakan untuk perhitungan.
Data survei tingkat rumah tangga digunakan di banyak negara untuk mengumpulkan sumber data kemiskinan, namun desain statistik dan frekuensi survei ini bervariasi antarnegara.
5. Konsep tingkat minimum dari pendapatan atau pengeluaran per orang harus jelas untuk mengklasifikasikan sebagai rumah tangga miskin atau tidak.
6. Penyesuaian deflator garis kemiskinan yang melibatkan perubahan garis kemiskinan dari waktu ke waktu untuk menjaga daya beli riilnya agar tetap konstan. Hal ini disebabkan harga konsumen bervariasi di banyak wilayah.

Konsep Ketimpangan Pembangunan

Ketimpangan identik dengan ketimpangan dalam hal pendapatan. Namun, Mount (2008: 3) menyatakan bahwa ketimpangan terjadi bukan hanya dalam hal pendapatan dan setiap penduduk berhak atas kesetaraan di bidang (1) politik dan persamaan kewarganegaraan di hadapan hukum; (2) pendapatan dan kesejahteraan; (3) akses infrastruktur atau kesempatan hidup; (4) ide atau gagasan; dan (5) keanggotaan dalam masyarakat.

Todaro dan Smith (2014: 284) mengatakan terdapat hubungan antara kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan yang dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk. Penduduk miskin, khususnya penduduk yang sangat miskin, cenderung terpapar dampak negatif dari adanya peningkatan penduduk. Ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi ketika pendapatan yang diterima masyarakat terdistribusi secara tidak merata. Distribusi pendapatan yang tidak ekstrim dapat menyebabkan beberapa hal, yaitu (a) inefisiensi ekonomi; (b) melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas; dan (3) umumnya dianggap tidak adil.

Untuk mengukur seberapa parahnya ketimpangan pendapatan suatu negara dapat dilihat melalui Rasio Gini (*gini ratio*). Rasio Gini merupakan suatu ukuran singkat yang menggambarkan derajat ketimpangan distribusi pendapatan suatu negara yang digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan sosial di masyarakat. Selain Rasio Gini, pengukuran ketimpangan antardaerah juga dapat dilakukan dengan perbandingan PDRB masing-masing daerah.

Bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dan didukung oleh Kementerian Perdagangan Urusan Luar Negeri dan Perdagangan, *World Bank* (2016: 4) menemukan empat penyebab utama masalah ketimpangan. Pertama, ketimpangan peluang karena sejak kecil anak-anak yang dilahirkan dari keluarga miskin tidak mempunyai kesempatan awal yang baik sehingga sulit untuk sukses di masa depan. Kedua, pekerjaan yang tidak merata yang mana ada pekerja yang tidak mempunyai kesempatan untuk mengembangkan keterampilan sehingga terjebak dalam pekerjaan informal, produktivitas rendah, dan berupah rendah. Ketiga, tingginya konsentrasi kekayaan pada segelintir warga yang memiliki banyak aset keuangan dan fisik. Terakhir, ketahanan ekonomi rendah sehingga saat terjadi guncangan seperti krisis, bencana alam, dan guncangan politik yang membuat rumah tangga miskin akan semakin kehilangan kemampuannya untuk mendapatkan penghasilan yang layak, kesehatan, dan pendidikan yang baik.

Konsep Pertumbuhan Ekonomi yang *Pro Poor*

Pengentasan kemiskinan menjadi agenda penting pemerintahan. Angka kemiskinan menjadi isu utama karena menjadi tolok ukur keberhasilan sebuah pemerintahan. Pengurangan kemiskinan menurut Son (2007: 6) bergantung pada dua faktor yaitu pertumbuhan ekonomi dan bagaimana pertumbuhan ekonomi didistribusikan untuk orang miskin dan tidak miskin.

Strategi pengentasan kemiskinan yang efektif di Indonesia menurut *World Bank* (2007: 97) terdiri dari tiga komponen, yaitu (1) menjadikan pertumbuhan ekonomi bermanfaat bagi penduduk miskin; (2) menjadikan perlindungan sosial bermanfaat bagi penduduk miskin; dan (3) menjadikan belanja pemerintah bermanfaat bagi penduduk miskin.

Strategi pembangunan *trickle down effect* berkembang pada tahun 1950an dan 1960an. Orang kaya mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu. Zaman dan Ahmed (2008) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi diperlukan namun tidak cukup untuk pengentasan kemiskinan. Masalah kemiskinan memang dapat diatasi melalui percepatan pertumbuhan ekonomi, namun apabila percepatan pertumbuhan itu menggunakan *trickle down effect* sebagai patokan akan terjadi ketergantungan terhadap kapitalis sebagai pemilik modal sehingga menambah jumlah penduduk miskin.

Hull (2009) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi akan mengurangi kemiskinan jika padat karya, namun jika padat modal akan menambah pengangguran sehingga berimbas pada naiknya jumlah penduduk miskin. Kakwani dan Pernia (2000) berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan kemiskinan karena ketimpangan distribusi pendapatan meningkat. Dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan akan lebih kuat jika *pro poor* karena penduduk miskin akan memperbaiki ekonominya sehingga lebih sejahtera dan distribusi pendapatan lebih merata.

Hubungan antara Ketimpangan Pembangunan, Pertumbuhan Ekonomi yang Pro-Poor, dan Kemiskinan

Engerman dan Sokoloff (2005) menjelaskan bahwa ketimpangan berbahaya bagi pertumbuhan karena:

1. ketimpangan yang tinggi menyebabkan pajak yang lebih tinggi sehingga berdampak negatif terhadap tingkat pertumbuhan;
2. ketimpangan tinggi mengarah untuk terjadi konflik sosial yang mengakibatkan ketidakstabilan sehingga berbahaya bagi pertumbuhan;
3. akses terbatas terhadap tanah, pendidikan, kredit, dan lainnya membuat sulit bagi masyarakat miskin untuk memanfaatkan peluang baru yang dibuat. Penduduk miskin akan sulit untuk memajukan keterampilan dan menciptakan mobilitas sosial yang terbatas sehingga menurunkan laju pertumbuhan;
4. negara-negara dengan ketimpangan yang tinggi mengembangkan institusi dan kebijakan yang mendukung orang kaya dan berinvestasi terlalu sedikit di barang publik yang mendukung pengurangan kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan.

World Bank (2000: 6) memperkenalkan sebuah pemahaman tiga dimensi tentang kemiskinan yang terdiri dari: (1) kesempatan, misalnya pendapatan, pendidikan, dan kesehatan; (2) keamanan; dan (3) pemberdayaan, misalnya akses dan kontrol atas sumber daya lokal, layanan publik, dan pengaruh dalam pengambilan keputusan lokal.

Bourguignon (2003) menggambarkan kemiskinan, pertumbuhan, dan kesenjangan melalui model *Poverty-Growth-Inequality Triangle*. Model ini menunjukkan bahwa untuk mengurangi kemiskinan memerlukan kombinasi kebijakan di seluruh negara yang berfokus pada pertumbuhan. Selain itu, kebijakan di seluruh negara yang berfokus pada pengurangan ketimpangan juga diperlukan.

Kemiskinan merupakan permasalahan di semua negara, terutama negara berkembang. Pengentasan kemiskinan merupakan agenda setiap pemerintahan. Salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sebagai syarat penurunan kemiskinan ini harus *pro poor* agar tidak hanya dinikmati oleh penduduk kaya. Selain *pro poor*, Klasen (2007) menyatakan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik diperlukan pertumbuhan ekonomi yang fokus pada ketimpangan. Untuk negara-negara di Amerika Latin, Asia Selatan, Asia Timur, dan Asia Tenggara diperlukan kesetaraan di bidang pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kesempatan kredit.

Definisi dari Ravallion (2004) mengenai pertumbuhan ekonomi yang *pro poor* adalah pertumbuhan yang meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan dengan demikian mengurangi tingkat kemiskinan, atau pertumbuhan yang meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dengan lebih dari tingkat pertumbuhan. Evans (2000) mendefinisikan pertumbuhan yang *pro poor* adalah pertumbuhan yang menguntungkan orang miskin. Son (2003) dan Kakwani *et al.* (2004) mempunyai pandangan yang sama tentang kondisi pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat bagi penduduk miskin.

Penelitian Terdahulu

Republik Rakyat Cina (RRC) merupakan salah satu negara yang masyarakatnya paling egalitarian karena penataan sistem sosialis yang menekankan

bahwa kesetaraan sosial merupakan tujuan sosialisme. Namun, pada tahun 1990an, RRC menjadi salah satu negara dengan tingkat ketimpangan terbesar di kawasan Asia dan Pasifik serta di antara negara berkembang lainnya yang di tahun 1991 rasio gini sebesar 0,29 kemudian pada tahun 1995 meningkat menjadi 0,39. Hasil empiris penelitian Lin (1993) di RRC pada tahun 1993 membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi di RRC antara tahun 1985 dan 2001 efektif dalam mengurangi kemiskinan, namun meningkatnya ketimpangan mengurangi efektivitas pengentasan kemiskinan. Hasil empiris juga menunjukkan bahwa tingkat ketidaksetaraan awal penting dalam menentukan kebijakan pertumbuhan suatu negara yang wilayahnya berada dalam tahap pengembangan yang berbeda. Dua alat penting dalam mendistribusikan pendapatan dan penurunan ketimpangan adalah pajak dan subsidi.

Ketimpangan akibat pola distribusi pendapatan yang buruk juga terjadi di Brazil. Negara dengan konsentrasi pendapatan yang tinggi ini masih menunjukkan salah satu pola distribusi pendapatan terburuk di dunia, walaupun stabilisasi makroekonomi pada pertengahan tahun 1990an telah dilakukan. Masalah distribusi pendapatan ini telah menarik perhatian banyak peneliti di seluruh dunia dan merupakan titik sentral perdebatan di Brasil. Filho dan Horridge (2006) melakukan penelitian tentang integrasi ekonomi kemiskinan dan kesenjangan regional di Brazil pada tahun 2006. Hasil penelitian menunjukkan ketidaksetaraan berkurang dengan cara pengurangan konsentrasi dalam rumah tangga termiskin, proporsi rumah tangga miskin, dan sejauh mana ketimpangan terkonsentrasi dalam rumah tangga termiskin.

Penelitian mengenai ketimpangan juga dilakukan oleh Lesmann (2011) di 56 negara menggunakan analisis data panel tahun 1980-2009. Hasilnya menunjukkan hubungan antara ketimpangan regional dan pembangunan ekonomi berbentuk U terbalik seperti hipotesis Kuznets (1955). Penelitian ini menganalisis dampak desentralisasi politik dan fiskal pada kesenjangan regional. Desentralisasi fiskal ditemukan menurunkan ketimpangan regional di negara maju, sedangkan di negara berkembang meningkatkan ketimpangan regional.

Selain ketimpangan, kemiskinan juga menjadi topik menarik yang telah diteliti banyak peneliti sebelumnya, misalnya Litschig dan Morrison (2013) dan Chotia dan Rao (2015). Hasil penelitian Litschig dan Morrison (2013) di Brazil mendapatkan bahwa penurunan kemiskinan dapat dilakukan dengan menambah transfer pemerintah kepada pemerintah daerah. Peningkatan 20% transfer pemerintah kepada daerah menurunkan kemiskinan sebesar 4%, selain itu meningkatkan tingkat sekolah per kapita sebesar 7% dan angka melek huruf sekitar 4%.

Chotia dan Rao (2015) menggunakan Analisis Komponen Utama untuk menghitung *Composite Infrastructure Index* (CII) dengan menggabungkan indikator kesehatan, pendidikan, transportasi, pendidikan, pertanian, dan energi membuktikan bahwa ada korelasi negatif antara PDB per kapita dan kemiskinan. PDB per kapita dan CII berkorelasi positif. Pengeluaran untuk program kesehatan sosial relevan secara signifikan lebih tinggi di negara bagian dengan peringkat PDRB per kapita teratas. Negara maju dengan tingkat kesehatan yang baik juga memiliki struktur organisasi sosial yang lebih baik, yang pada akhirnya beralih ke manfaat pembangunan bersama yang inklusif. Salah satu cara untuk membuat daerah tertinggal menjadi negara maju adalah dengan meningkatkan transfer fiskal dari pusat kepada daerah sehingga mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup untuk

menarik investor masuk. Tujuan utama dari perbaikan di sektor kesehatan, pendidikan, transportasi, pertanian, dan energi adalah untuk membantu daerah miskin keluar dari kemiskinan dan berpartisipasi lebih dalam proses pembangunan.

Di Indonesia, penelitian mengenai ketimpangan dan kemiskinan telah dilakukan oleh Hartono (2008), Ginting (2015), dan Baransano *et al.* (2016). Hartono (2008) melakukan penelitian menggunakan data tahun 1981 sampai dengan 2005 di Provinsi Jawa Tengah. Ketimpangan pembangunan ekonomi antardaerah yang semakin melebar dapat diturunkan dengan peningkatan investasi, peningkatan jumlah angkatan kerja yang bekerja, dan bantuan pembangunan per kapita pemerintah pusat kepada daerah sehingga tingkat kemiskinan akan berkurang.

Ginting (2015) melakukan penelitian dengan menghubungkan kemiskinan dan ketimpangan wilayah terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia. Hasilnya, tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2004-2013 menurun sejalan dengan menurunnya ketimpangan pembangunan antarwilayah. Selain indeks ketimpangan pembangunan antarwilayah, variabel lain yang digunakan untuk melihat kemiskinan adalah PDRB, investasi, dan aglomerasi.

Selanjutnya, Baransano *et al.* (2016) memfokuskan penelitiannya pada disparitas pembangunan daerah dan faktor-faktor yang memengaruhi ketidakseimbangan antardaerah di Provinsi Papua Barat untuk periode 2005 sampai 2014. Berdasarkan Indeks Williamson, hasil menunjukkan bahwa tren fluktuasi ketidaksetaraan pembangunan daerah di Provinsi Papua Barat cenderung meningkat pada periode tersebut. Regresi data panel menggunakan PDB per kapita (X1), populasi (X2), alokasi alokasi dana (X3), dan *Human Development Index* (X4) sebagai variabel independen serta nilai Indeks Williamson sebagai variabel dependen, yang secara bersamaan, semuanya bervariasi secara signifikan.

METODE PENELITIAN

Data

Penelitian ini menggunakan data yang berkaitan dengan ketimpangan pembangunan antarkabupaten yang diukur dengan PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 2000, realisasi APBD per kapita menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 Tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran, jumlah penduduk, pendidikan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah, infrastruktur yang diukur dengan persentase panjang jalan yang diaspal, dan kemiskinan kabupaten di Nusa Tenggara Barat yang diukur dengan menggunakan persentase jumlah penduduk miskin. Data yang digunakan bersumber dari BPS, kecuali data realisasi APBD yang dikumpulkan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Periode data yang digunakan adalah mulai dari tahun 2010 sampai dengan 2016. Periode waktu tersebut dipilih karena sebelum tahun 2010 jumlah sektor dalam PDRB berbeda jumlahnya dibanding dengan tahun 2010 sampai dengan tahun 2016.

Growth Incidence Curve (GIC) yang digambarkan melalui data pengeluaran menurut desil yang bersumber dari olahan data *Survei Sosial Ekonomi Nasional* (Susenas) juga digunakan untuk melihat apakah pembangunan ekonomi di NTB sudah *pro poor* atau belum. Setelah mengetahui pertumbuhan ekonomi sudah *pro poor* atau belum, analisis sektor yang memengaruhi kemiskinan juga dilakukan

dengan menggunakan data yang bersumber dari sektor-sektor, yaitu (1) kehutanan, perikanan, dan pertanian; (2) penggalian dan pertambangan; (3) industri pengolahan; (4) pengadaan gas dan listrik; (5) pengadaan air, pengelolaan limbah, sampah, dan daur ulang; (6) konstruksi; (7) perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; (8) pergudangan dan transportasi; (9) penyediaan makan minum dan akomodasi; (10) komunikasi dan informasi; (11) jasa keuangan dan asuransi; (12) real estat; (13) jasa perusahaan; (14) administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib; (15) jasa pendidikan; (16) jasa kegiatan sosial dan kesehatan; dan (17) jasa lainnya.

Metode Analisis

Tahapan pertama dari proses analisis adalah dengan menganalisis deskriptif data. Analisis deskriptif ini memberikan gambaran mengenai kemiskinan serta karakteristik dari variabel yang digunakan dalam penelitian. Setelah menganalisis deskriptif data, maka tahapan selanjutnya adalah menganalisis pengaruh ketimpangan pembangunan terhadap kemiskinan menggunakan analisis data panel. Model yang digunakan dalam tahap ini diadopsi dari model Seetanah *et al.* (2009) sebagai berikut:

$$\text{Persentase Jumlah Penduduk Miskin} = f(\ln \text{PDRB per kapita}, \ln \text{APBD per kapita}, \ln \text{Rata-rata Lama Sekolah}, \ln \text{Jumlah Penduduk}, \text{Persentase Jalan Diaspal}) \quad (1)$$

Sebelum melakukan regresi data panel, model yang tepat perlu dipilih terlebih dahulu melalui tiga pengujian. *Pertama*, dilakukan Uji Chow (F Statistik) untuk memilih antara model regresi *ordinaly least square pooled* atau model *fixed effect*. *Kedua*, Uji *Lagrange Multiplier* (LM) untuk memilih model regresi *ordinaly least square pooled* atau model *random effect*. *Terakhir*, Uji Hausman untuk memilih antara model *fixed effect* atau model *random effect*.

Selanjutnya, untuk melihat pertumbuhan ekonomi di NTB sudah *pro poor* atau belum digunakan *Growth Incidence Curve* (GIC). Metode ini dikembangkan oleh Ravallion dan Chen (2003). GIC dirumuskan dengan:

$$g(p) = \gamma + d\text{Ln}(L'(p)) \quad (2)$$

dengan $g(p)$ adalah GIC, $\gamma = d\text{Ln}(\mu)$ yaitu tingkat pertumbuhan rata-rata pendapatan dari seluruh penduduk dan $L'(p)$ adalah turunan pertama dari fungsi kurva Lorenz.

Jika $g(p) > \text{nol}$ (bernilai positif), maka GIC bernilai positif pada keseluruhan penduduk persentil-p dan mengindikasikan terjadinya pengurangan penduduk miskin, meskipun belum bisa dipastikan bahwa pertumbuhan bersifat *pro poor*. Jika $g(p) < \text{nol}$ (bernilai negatif atau tidak semua positif) pada keseluruhan penduduk persentil-p, berindikasi tidak terjadi pengurangan penduduk miskin. Proses pembangunan ekonomi dalam suatu wilayah tertentu dapat dikatakan bersifat *pro poor* jika kurva memotong garis rata-rata dari kiri atas ke kanan bawah (*downward sloping*) dan jika sebaliknya atau *upward sloping*, maka proses pembangunan ekonomi tersebut belum bersifat *pro poor*.

Warr (2006) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sektoral bisa mengurangi kemiskinan. Model yang dikembangkan oleh Warr (2006) adalah berikut:

$$\log P_{it} = k + \sum_{j=1}^9 l_j \log H_{it} Y_{it} + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

dengan P adalah jumlah penduduk miskin, H adalah pangsa PDRB konstan per kapita sektor ke- j , dan Y adalah PDRB konstan per kapita sektor ke- j .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis deskriptif

Pertumbuhan ekonomi NTB tercatat sebesar 4,93% pada tahun 2006 dan meningkat menjadi 5,82% pada tahun 2016. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini tidak diikuti oleh pemerataan hasil pembangunan. Bappeda NTB (2016: 30) menyatakan bahwa ketimpangan di NTB terjadi karena rendahnya aksesibilitas pelayanan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi. Kesenjangan ekonomi antarkabupaten NTB cukup tinggi yang terlihat dari ketimpangan antara PDRB per kapita tertinggi dan PDRB per kapita terendah. Kabupaten Lombok Timur dengan sektor pertanian sebagai sektor utamanya mencatat PDRB per kapita terendah di antara kabupaten yang lain yaitu sebesar Rp13.669.026. Tingginya kontribusi sektor tambang menjadikan Kabupaten Sumbawa Barat sebagai kabupaten dengan PDRB per kapita tertinggi dengan nilai lebih dari sepuluh kali lipat bila dibanding dengan PDRB perkapita Kabupaten Lombok Timur.

Tabel 1 Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk Kabupaten/ Kota di NTB 2016

Kab/ Kota	Jumlah Penduduk (orang)	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (orang/ km ²)
[1]	[2]	[3]	[4]
Lombok Barat	665.132	1.053,87	631
Lombok Tengah	922.088	1.208,4	763
Lombok Timur	1.173.781	1.605,55	731
Sumbawa	445.503	6.643,98	67
Dompu	241.888	2.324,6	104
Bima	473.89	4.389,4	108
Sumbawa Barat	137.072	1.849,02	74
Lombok Utara	214.393	809,53	265
Mataram	459.314	61,3	7493
Bima	163.101	207,5	786
NTB	4.896.162	20.153,15	243

Sumber: BPS NTB, 2017a

BPS NTB (2017a: 552) menyatakan bahwa kondisi geografis dan alam menjadikan aktivitas di bidang kehutanan, perikanan, dan pertanian (21%), serta pertambangan dan penggalian (22%) menghasilkan nilai tambah yang cukup tinggi di antara bidang-bidang lainnya. Selanjutnya, sektor lain yang mempunyai kontribusi

cukup tinggi adalah perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor. Kontribusi sektor industri di NTB hanya sebesar 5% sehingga tidak dapat menopang sektor pertanian. Aktivitas industri ini sebagian besar merupakan industri rumah tangga. BPS NTB (2017b: 39) menunjukkan bahwa penciptaan nilai tambah terbesar pada lapangan usaha industri berasal dari aktivitas industri minuman dan makanan yaitu sekitar 51% dan aktivitas pengolahan tembakau yang berupa pengeringan daun tembakau sekitar 26%.

Secara geografis, NTB memiliki dua pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Sumbawa. Luas Pulau Lombok hanya 23,5% dari seluruh luas wilayah, namun 70% penduduk NTB tinggal di Pulau Lombok (lihat Tabel 1). Pulau Lombok sebagai destinasi wisata dan sebagai tempat ibukota provinsi yaitu Kota Mataram tentu memiliki infrastruktur yang lebih baik bila dibanding dengan kota-kota di Pulau Sumbawa. BPS NTB (2016: 6), menyatakan bahwa distribusi penduduk yang tidak merata atau timpang ini dipengaruhi oleh situasi tempat tinggal di Lombok yang lebih strategis, lebih baik, tanah yang subur, tempat yang aman, serta ketersediaan fasilitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Berdasarkan data BPS NTB (2017c), dari keseluruhan jalan yang diaspal di NTB, 61% berada di Pulau Lombok. Walaupun jalan negara sudah diaspal, jalan Pulau Sumbawa masih didominasi oleh jalan kerikil dan tanah. Jalan negara di Pulau Sumbawa merupakan bantuan dari Pemerintah Australia melalui program *Eastern Indonesian National Road Improvement Project* (EINRIP) yang dimulai pembangunannya sejak 2009 dan selesai dibangun pada tahun 2012. Dari 10 kabupaten di NTB, hanya 3 kabupaten yang rasio antara jalan dengan luas wilayahnya di atas 1 yang berarti tiap 1 km persegi luas wilayah terdapat jalan sepanjang lebih dari 1 km. Kota Mataram dengan luas wilayah sebesar 61,3 km persegi mempunyai jalan sepanjang 400,06 km. Kota Bima mempunyai jalan sepanjang 258,11 km pada tahun 2016 dengan luas wilayah sebesar 207,5 km persegi. Lombok Timur dengan luas wilayah sebesar 1.605,55 km persegi mempunyai jalan sepanjang 2.379,18 km.

Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu indikator untuk melihat pemerataan di bidang pendidikan adalah dengan melihat rata-rata lama sekolah. Tahun 2016, rata-rata lama sekolah untuk NTB sebesar 6,79 tahun. Nilai rata-rata lama sekolah untuk Kota Mataram dan Kota Bima jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata provinsi dan kabupaten lainnya. Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Utara mempunyai nilai rata-rata lama sekolah kurang dari 6 tahun.

BPS NTB (2017d: 1) menjelaskan bahwa manajemen pengelolaan APBD penting dalam implementasi kebijakan pembangunan sehingga perlu dikelola secara efektif, efisien, dan ekonomis. Dengan diberlakukannya Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah mempunyai wewenang dalam menentukan arah pembangunan secara lebih mandiri. Secara umum, penerimaan daerah kabupaten di NTB pada tahun 2016 masih ditopang oleh dana perimbangan sebesar 69,30% yang berarti tingkat kemandirian hampir seluruh kabupaten masih rendah. Kota Mataram pada tahun 2015 mempunyai rasio PAD

tertinggi dibanding kabupaten yang lain yaitu sebesar 18,93%. Angka tersebut jauh bila dibanding dengan Kota Bima yang hanya sebesar 4,26% (BPS NTB, 2017d: 25).

Dari sisi realisasi pendapatan, Kabupaten Lombok Utara hanya mencapai 652,34 miliar rupiah, sedangkan Kabupaten Lombok Timur mencapai 2,01 triliun rupiah. Ketimpangan selanjutnya adalah dari sisi belanja, Kabupaten Lombok Utara memiliki nilai pendapatan yang relatif kecil sehingga realisasi nilai belanja menempati peringkat paling bawah di antara kabupaten/kota yang lain yaitu sebesar 662,04 miliar rupiah. Kabupaten Lombok Timur menempati peringkat tertinggi dengan realisasi belanja sebesar 1,94 triliun rupiah (BPS NTB, 2017d: 27).

Sejak krisis ekonomi pada tahun 1997, NTB terus mengalami penurunan jumlah penduduk miskin. Tahun 2004, persentase penduduk miskin NTB sebesar 25,26%. Namun, pada tahun 2005 persentase penduduk miskin meningkat menjadi 25,92% dan terus meningkat menjadi 27,17%. Akibat harga minyak dunia yang naik tajam dari 25 dolar AS per barrel menjadi 60 dolar AS per barrel, pada tahun 2005 pemerintah dua kali menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium yaitu pada April dan Oktober. Kenaikan BBM secara signifikan sebesar 32% di April dan 87% di Oktober diduga sebagai pemicu naiknya jumlah penduduk miskin. Hal lain yang diduga meningkatkan jumlah penduduk miskin adalah akibat kenaikan harga beras sebagai dampak larangan impor beras sehingga harga beras naik sampai sekitar 33% per kilogramnya. Namun, sejak tahun 2007 sampai dengan 2016, persentase penduduk miskin di NTB mengalami penurunan.

Garis kemiskinan pada Maret 2016 di NTB ditetapkan sebesar Rp333.996 dengan rincian Rp250.371 untuk makanan dan Rp83.624 untuk nonmakanan. Pada September 2016 mengalami perubahan sebesar 0,77%. Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk NTB sebesar Rp465.998,6 untuk makanan dan Rp431.749,6 untuk nonmakanan.

Analisis pengaruh ketimpangan pembangunan terhadap kemiskinan di Nusa Tenggara Barat

Pengaruh guncangan seperti Pilkada atau saat aktivitas tambang melemah sehingga menurunkan PDRB telah diantisipasi dengan memasukkan *dummy* regional berupa pulau ke dalam model seperti yang tercantum dalam Lampiran 2. Namun, dikarenakan hasil yang tidak sesuai dengan teori, model awal tanpa *dummy* regional tetap digunakan dalam analisis ini. Lalu, berdasarkan pada hasil uji Chow, LM, dan Hausman (lihat Lampiran 1), model *random effect* digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 2 Ringkasan Regresi Model Pengaruh Ketimpangan Pembangunan terhadap Kemiskinan di NTB, 2016

No	Variabel	Koefisien Hasil Regresi
[1]	[2]	[3]
1	Ln PDRB per kapita	-4,5463***
2	Ln APBD per kapita	-2,2802**
3	Ln Jumlah Penduduk	-5,2355**
4	Ln Rata-rata lama sekolah	-17,6071***
5	Persentase Panjang Jalan yang Diaspal	-0,2820
	Konstanta	169,0687***

*p < 0,1; ** p < 0,01; *** p < 0,05

Berdasarkan hasil regresi data panel pada Lampiran 2, ditemukan bahwa PDRB per kapita, APBD per kapita, jumlah penduduk, dan lama sekolah berkorelasi negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di NTB. Hanya satu variabel yang tidak signifikan mengurangi persentase penduduk miskin yaitu persentase jalan yang diaspal. Hal tersebut dikarenakan 61% jalan aspal berada di Pulau Lombok sehingga tidak berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan di NTB. Tabel 2 merupakan ringkasan dari hasil regresi data panel. Model yang digunakan adalah *log-log* sehingga koefisien pada variabel bebas merupakan nilai elastisitas terhadap variabel terikat. Penjelasan masing-masing variabel tersebut adalah sebagai berikut.

PDRB per kapita

Hasil regresi menunjukkan bahwa PDRB per kapita berkorelasi negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di NTB. Temuan ini didukung oleh Dollar dan Kraay (2002) dan Agrawal (2008). Tingkat pertumbuhan PDB yang lebih tinggi ditemukan terkait dengan pengurangan kemiskinan yang lebih cepat di 75 negara (Dollar dan Kraay, 2002). Pertumbuhan PDB ini terkait dengan produksi barang dan jasa yang meningkat sehingga meningkatkan jumlah tenaga kerja.

Penurunan kemiskinan di NTB ini terindikasi diakibatkan oleh tingkat pertumbuhan ekonomi NTB yang sempat menduduki peringkat tertinggi di seluruh Indonesia pada tahun 2015, walaupun melambat pada tahun 2016. Menurut BPS NTB (2016), melambatnya perekonomian di NTB sejalan dengan produktivitas kegiatan pertambangan biji logam di PT Amman Mineral Nusa Tenggara yang telah mencapai titik produksi yang optimal. Pada tahun 2016, sektor pertambangan memberikan kontribusi terbesar pada PDRB NTB yaitu sebesar 22%, sedikit lebih tinggi dibanding sektor kehutanan, perikanan, dan pertanian yang memberikan kontribusi sebesar 21%.

Realisasi belanja APBD per kapita

Struktur belanja dalam realisasi APBD 2016 di 10 kabupaten/kota di NTB menunjukkan bahwa pengeluaran terbesar pemerintah daerah masih untuk belanja pegawai yaitu sebesar 48%. Menurut fungsinya, struktur belanja sudah menempatkan pendidikan sebagai prioritas yaitu sebesar 31%. Sektor pelayanan umum menempati porsi terbesar kedua yaitu sebesar 26%. Perumahan dan fasilitas umum mendapatkan porsi dalam belanja APBD sebesar 16%. Belanja pemerintah untuk sektor kesehatan sebesar 13%. Struktur belanja dalam APBD yang sudah menempatkan pendidikan, pelayanan umum, perumahan dan fasilitas umum, serta kesehatan sebagai porsi terbesar inilah yang diduga dapat mengurangi kemiskinan di NTB.

Dampak belanja pemerintah terhadap kemiskinan bisa langsung dan tidak langsung. Pengaruh dalam bentuk manfaat yang diterima kaum miskin dari pengeluaran untuk program ketenagakerjaan dan kesejahteraan merupakan bentuk efek langsung. Efek tidak langsung muncul saat investasi pemerintah di bidang infrastruktur pedesaan seperti jalan, pertanian, dan kesehatan dan pendidikan sehingga menghasilkan kesempatan kerja dan meningkatkan penghasilan penduduk miskin. Hubungan negatif antara belanja pemerintah dan kemiskinan juga ditemukan oleh Fan *et al.* (2000) dan Darmadeh dan Tabar (2013).

Fan *et al.* (2000) yang menunjukkan investasi tambahan di jalan pedesaan dan penelitian pertanian akan mengurangi kemiskinan di pedesaan karena menghasilkan

pertumbuhan produktivitas yang tinggi di India tahun 1970-1993. Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan mempunyai dampak pengurangan kemiskinan lebih rendah jika dibanding dengan investasi seperti irigasi, konservasi tanah dan air, kesehatan, dan pengembangan masyarakat perdesaan. Kemudian, Darmadeh dan Tabar (2013) menggunakan data Iran dari tahun 1978 sampai dengan 2008 menunjukkan bahwa dalam jangka panjang pengeluaran pemerintah berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan.

Jumlah penduduk

Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh unsur demografi yaitu fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian), dan migrasi (perpindahan penduduk). Hasil *Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015* dalam BPS NTB (2016: 35) menunjukkan ada 6,91% kejadian kematian perempuan NTB umur 15-49 tahun yang terjadi pada masa maternal. Dari sisi fertilitas, rata-rata wanita di NTB melahirkan 2 anak dengan usia kawin pertama 19,95 tahun. Dari sisi migrasi, berdasarkan olahan dari data *Sensus Penduduk 2010* ada sejumlah 47.648 migran masuk ke NTB, sedangkan migran keluar NTB sebanyak 40.274 orang. Jumlah migran neto sebesar 7.401, artinya penduduk NTB bertambah karena lebih banyak migran yang masuk dibanding dengan yang keluar.

Migran masuk paling banyak menuju Kota Mataram dan Kota Bima. Sebagai wilayah perkotaan, kedua kota tersebut memang menjadi daya tarik bagi migran dalam hal perdagangan dan pendidikan. Berdasarkan alasan utama, migrasi risen masuk ke NTB sebanyak 37,88% untuk mencari pekerja. Secara garis besar, migran risen bekerja di sektor jasa sebesar 53,85%, sektor pertanian 32,54%, dan sektor industri 13,60%. Penambahan jumlah penduduk tersebut akan menurunkan kemiskinan karena berkaitan dengan peningkatan produktivitas barang dan jasa sehingga menyerap tenaga kerja.

Pendidikan

Rata-rata lama sekolah menjadi salah satu kunci mengurangi kemiskinan. Namun demikian, bagi penduduk miskin masih memiliki rata-rata lama sekolah yang relatif lebih pendek (BPS NTB, 2016). Karakteristik penduduk miskin di NTB menurut pendidikan kepala rumah tangga didominasi oleh belum tamat SD sebesar 50,77% dan lulusan SD sebesar 29,75%. Oleh karena itu, alokasi anggaran untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah keluarga miskin dibutuhkan karena sekaligus dapat mengurangi kemiskinan.

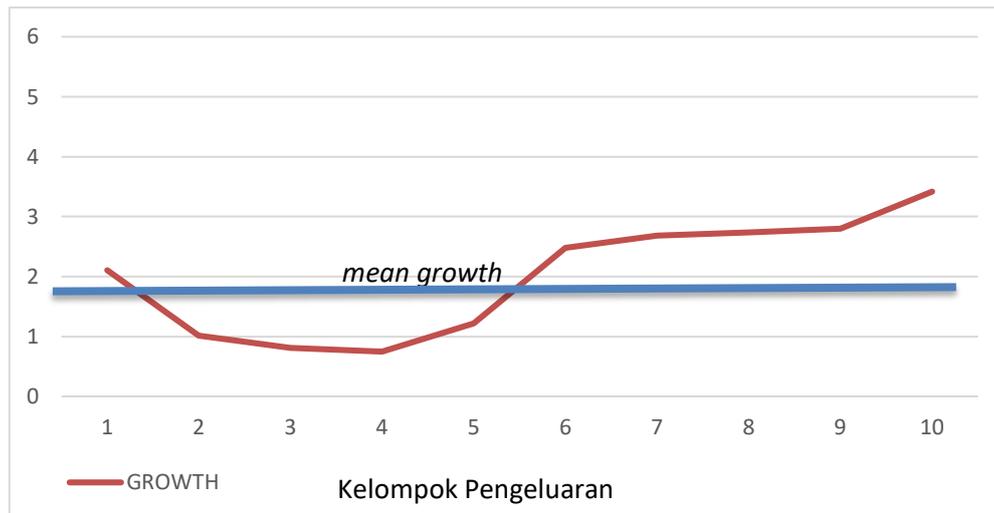
Analisis pertumbuhan ekonomi yang *pro poor*

GIC digunakan untuk menginvestigasi manfaat pertumbuhan ekonomi selama 2000-2016 di kabupaten/kota di NTB sudah dinikmati penduduk miskin atau belum. Gambar 1 memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi di NTB belum bersifat *pro poor* karena tidak menunjukkan bentuk *downward sloping*. GIC untuk tiap kabupaten ditampilkan untuk melihat pertumbuhan ekonomi kabupaten yang sudah *pro poor*. Namun, GIC dari ke-10 kabupaten/kota tersebut menunjukkan hasil yang sama dengan GIC NTB secara keseluruhan.

Hal ini selaras dengan penelitian Ravallion (2005) yang dilakukan menggunakan data India dan Cina tahun 1990-2000. Meskipun pertumbuhan

ekonomi mampu menurunkan kemiskinan, namun pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh penduduk dengan penghasilan yang tinggi. Pada tahun 2016, angka kemiskinan di NTB menurun namun tidak *pro poor*. Hal ini diduga disebabkan oleh penurunan kemiskinan yang lebih fokus pada transfer pendapatan (*cash transfer*).

Gambar 1 Growth Incidence Curve NTB 2000-2016



Sumber: BPS NTB (2000-2016)

Menurut de Janvry dan Sadoulet (2010), ada dua cara yang dapat digunakan untuk menurunkan tingkat kemiskinan, yaitu transfer pendapatan (*cash transfer*) dan pertumbuhan ekonomi yang *pro poor*. Kelebihan dari transfer pendapatan kepada penduduk miskin adalah dapat mengatasi permasalahan kemiskinan dengan cepat, tetapi cara ini memerlukan dana besar dan program redistribusi yang tepat sasaran. Transfer pendapatan juga kurang efektif diterapkan jika penduduk miskin memiliki potensi kerja sehingga tidak dapat menurunkan tingkat kemiskinan secara berkelanjutan.

Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi sektoral terhadap kemiskinan di Nusa Tenggara Barat

Penelitian ini menggunakan model dikembangkan oleh Warr (2006) untuk menginvestigasi efek pertumbuhan ekonomi sektoral terhadap kemiskinan di NTB. Model yang digunakan dalam analisis panel kali ini adalah *fixed effect*. Model ini dipilih berdasarkan hasil dari uji Chow, LM, dan Hausman. Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 3, ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi di sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, serta sektor jasa keuangan dan asuransi dapat mengurangi kemiskinan di NTB.

Perkembangan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum didukung oleh berkembangnya sektor pariwisata seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Laju pertumbuhan sektor ini pada tahun 2016 sebesar 10,44%, lebih tinggi apabila dibanding pada tahun 2015 sebesar 5,65%. Menurut BPS NTB (2016),

peningkatan sektor ini sejalan dengan peningkatan jumlah tamu hotel sebesar 53,73%.

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) *year on year* menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Contohnya, TPK Mei 2017 terhadap Mei 2016 meningkat sebesar 7,23%. Jumlah tamu hotel bintang pada September 2017 sebanyak 86.939 orang dengan TPK 53,32%, sedangkan untuk TPK hotel nonbintang sebesar 25,09%. TPK di NTB yang terus meningkat menunjukkan bahwa akomodasi di NTB diminati oleh pengunjung.

Tabel 3 Ringkasan Regresi Model Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Sektoral terhadap Kemiskinan di NTB, 2016

No	Variabel	Koefisien Hasil Regresi
[1]	[2]	[3]
1	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	-0,6355
2	Pertambangan dan penggalian	0,5706
3	Industri pengolahan	-0,0024
4	Pengadaan listrik dan gas	0,0145
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,1168**
6	Konstruksi	0,5148***
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	-0,6239***
8	Transportasi dan pergudangan	-0,0745
9	Penyediaan akomodasi, makan, dan minum	-0,2620***
10	Informasi dan komunikasi	0,0270
11	Jasa keuangan dan asuransi	-0,2867***
12	Real estate	-0,0564
13	Jasa perusahaan	0,0622
14	Administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial wajib	0,0179
15	Jasa pendidikan	-0,1428
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	-0,3765*
17	Jasa lainnya	0,2426**
	Konstanta	18,6137***

* $p < 0.1$; ** $p < 0,05$; *** $p < 0,01$

Perkembangan sektor jasa keuangan dan asuransi di NTB sangat pesat. Sepanjang tahun 2010 sampai dengan 2016 sektor ini mengalami pertumbuhan sebesar 111,76%. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi di NTB sebesar 5,82% dengan sektor jasa keuangan dan asuransi sebagai sektor dengan tingkat pertumbuhan paling tinggi. Data BPS NTB selama 2010-2016 menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi pada jasa perantara keuangan menjadi penyumbang terbesar pada sektor ini dengan kontribusi di atas 70%. Penyumbang terbesar berikutnya adalah jasa keuangan lainnya sekitar 17%. Asuransi dan dana pensiun menyumbang sekitar 5% terhadap sektor ini, sedangkan sumbangan terkecil adalah dari jasa penunjang keuangan di bawah 1%.

Dari ketiga sektor tersebut, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor memberikan andil tertinggi pada penurunan jumlah penduduk miskin. Secara umum laju pertumbuhan pada sektor ini sebesar 7,66%.

Kontribusi yang diberikan sektor ini terhadap perekonomian NTB ditemukan selalu di atas 10%.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan bahwa selama periode penelitian yaitu 2000-2016 terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi terus meningkat dan persentase penduduk miskin terus menurun. Namun, hal ini tidak diikuti oleh pemerataan pembangunan di 10 kabupaten di NTB. Ketimpangan pembangunan terjadi di bidang PDRB, APBD, jumlah penduduk, pendidikan, dan infrastruktur. Untuk melihat pengaruh ketimpangan pembangunan terhadap kemiskinan digunakan analisis data panel. Hasil menunjukkan bahwa peningkatan PDRB, realisasi belanja dalam APBD, jumlah penduduk, dan pendidikan signifikan memengaruhi penurunan kemiskinan di NTB, sedangkan infrastruktur berupa jalan diaspal tidak signifikan memengaruhi penurunan kemiskinan di NTB.

Identifikasi pertumbuhan ekonomi di NTB melalui metode GIC belum menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang *pro poor*. Kurva tidak berbentuk *downward sloping*. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi belum dinikmati oleh penduduk dengan kelas pengeluaran yang rendah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dinikmati oleh penduduk dengan pendapatan yang besar.

Selanjutnya, menggunakan analisis data panel 10 kabupaten/kota di NTB periode tahun 2010-2016, didapatkan hasil bahwa tidak semua pertumbuhan ekonomi sektoral berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan NTB. Hal ini disebabkan *share* sektor tersebut terhadap total PDRB yang terlalu kecil serta rendahnya penyerapan penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor tersebut. Sektor-sektor ekonomi yang pertumbuhannya bisa mengurangi kemiskinan secara signifikan adalah sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, serta sektor penyediaan akomodasi makan dan minum.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka implikasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai berikut. *Pertama*, pengurangan ketimpangan dalam hal PDRB, APBD, jumlah penduduk, pendidikan, dan infrastruktur jalan diharapkan akan mempercepat pengurangan kemiskinan. Untuk meningkatkan PDRB kabupaten yang masih rendah, pemerintah seharusnya mempermudah izin untuk investasi terutama di kabupaten yang berada di Pulau Sumbawa karena 98% dari total nilai investasi berada di Pulau Lombok, sedangkan dari sisi anggaran harus diawasi dengan jelas penggunaan anggaran agar sesuai dengan fungsinya. Untuk membuat penduduk NTB tinggal di Pulau Sumbawa lebih terkait pada sisi perbaikan di bidang keamanan dan infrastruktur seperti akses ke sekolah, akses menuju fasilitas kesehatan, serta akses menuju pusat ekonomi.

Kedua, NTB memerlukan kebijakan pemerintah yang dapat mendistribusikan pendapatan dari kalangan teratas kepada kalangan terbawah melalui kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif. *Ketiga*, perlu meningkatkan produktivitas pada sektor-sektor ekonomi yang pertumbuhannya bisa mengurangi kemiskinan secara signifikan seperti sektor perdagangan besar dan eceran, sektor penyediaan akomodasi makan dan minum, sektor reparasi mobil dan sepeda motor, serta sektor jasa keuangan dan asuransi.

Untuk sektor-sektor yang pertumbuhannya tidak signifikan memengaruhi kemiskinan harus dipacu agar pertumbuhannya bisa mengurangi persentase penduduk miskin di NTB.

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan. *Pertama*, perekonomian NTB terdiri atas 17 sektor di daerah perdesaan maupun perkotaan yang secara umum ketimpangan masih terlihat, yang mana perdesaan berada pada level yang lebih rendah dari pada perkotaan. Oleh karena itu, berbagai indikator perdesaan perlu dimasukkan di dalam analisis. *Kedua*, penelitian ini belum dilengkapi dengan data kualitas jalan untuk wilayah perdesaan, namun data tersebut belum tersedia sampai dengan level perdesaan. *Ketiga*, adanya keterbatasan data membuat penelitian ini belum memasukkan variabel dalam bidang ketenagakerjaan seperti jumlah angkatan kerja atau pengangguran. *Terakhir*, dari sisi penelitian tentang pertumbuhan ekonomi yang *pro poor* belum memisahkan status perdesaan dan perkotaan.

Oleh karena itu, untuk penelitian berikutnya yang serupa, dianjurkan untuk menggunakan metode lain seperti *Pro Poor Growth Index* (PPGI) atau *Poverty-Equivalent Growth Rate* (PEGR) untuk menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah sudah *pro-poor* atau belum. Lalu, apabila menggunakan metode GIC disarankan menggunakan data persentil pengeluaran agar lebih terlihat fluktuasinya. Selain itu, dari sisi teori, penelitian berikutnya agar lebih banyak mengacu kepada teori dan empiris dari hasil penelitian di dalam negeri agar lebih menggambarkan keadaan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2017. *Garis Kemiskinan*. Tersedia di <https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=50>, diakses pada 30 September 2017.
- Badan Pusat Statistik NTB. 2013. *Profil Migrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk 2010)*. Mataram: BPS NTB.
- . 2016. *Profil Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat Hasil Supas 2015*. Mataram: BPS NTB.
- . 2017a. *Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka*. Mataram: CV. Maharani.
- . 2017b. *Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha 2012-2016 Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka*. Mataram: CV. Maharani.
- . 2017c. *Statistik Transportasi Provinsi Nusa Tenggara Barat 2016*. Mataram: CV. Maharani.
- . 2017d. *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2016*. Mataram: CV. Maharani.
- Bappeda NTB. 2016. *Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015*. Mataram: Bappeda NTB.
- Baransano, M. A., Putri, E. I. K., Achسانی, N. A., & Kolopaking, L. M. 2016. Analysis of Factors Affecting Regional Development Disparity in the Province of West Papua. *Journal of Economics and Development Studies*, 4 (2), 115-128.

- Bourguignon. 2003. The Difficult Task of Expanding the Income Poverty Paradigm. *Paper prepared for the conference on "Conceptual challenges in poverty and inequality analysis", Cornell University, 16-17 April 2002.*
- Chotia, V., & Rao, N. V. M. 2015. Examining The Interlinkages between Regional Infrastructure Disparities, Economic Growth, and Poverty: A Case of Indian States. *Economic Annals*, LX (205).
- Darmadeh, N., & Tabar, M. H. 2013. Government Expenditures and Its Impact on Poverty Reduction (Empirical from Sistan and Baluchestan Province of Iran). *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences* January, 2 (1).
- de Janvry, A., & Sadoulet, E. 2010. Agricultural Growth and Poverty Reduction: Additional Evidence. *World Bank Research Observer*, 25, 1-20.
- Dollar, D., & Kraay, A. 2002. Growth is Good for the Poor. *Journal of Economic Growth*, 7, 195-225.
- Engerman, S. L., & Sokoloff, K. L. 2005. Colonialism, Inequality, and Long-Run Paths of Development. *National Bureau of Economic Research*.
- Evans, A. 2000. Poverty Reduction in the 1990s: The World Bank Strategy. *World Bank Operations Evaluation Department*, 1 (1).
- Fan, S., Hazell, P., & Thorat, S. 2000. Government Spending, Growth and Poverty in Rural India. *American Journal Agricultural Economics*, 82 (4), 1038-1051.
- Fan, S., & Kang, C. C. 2004. Road Development, Economic Growth, and Poverty Reduction in China. *International Food Policy Research Institute*.
- Filho, J., & Horridge, M. J. 2006. Economic Integration, Poverty and Regional Inequality in Brazil. *FAPESP*, 60 (4), 363-387.
- Ginting, A. M. 2015. Pengaruh Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah Terhadap Kemiskinan di Indonesia 2004-2013. *Kajian*, 20 (1), 45-48.
- Hartono, B. 2008. Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. *Tesis tidak diterbitkan*. Universitas Diponegoro.
- Hull, K. 2009. Understanding the Relationship between Economic Growth, Employment, and Poverty Reduction. *Organization for Economic Cooperation and Development*.
- Kakwani, N., & Pernia, E. M. 2000. What is Pro-poor Growth?. *Asian Development Bank*, 18 (1), 1-16.
- Kakwani, N., Khandker, S., & Son, H. H. 2004. Pro-Poor Growth: Concepts and Measurement with Country Case Study. *United Nations Development Programme International Poverty Centre*, 1.
- Klasen, S. 2007. Determinant of Pro-Poor Growth. *International Food Policy Research Institute*.
- Kuznets, S. Economic Growth and Income Inequality. 1955. *The American Economic Review*, 45 (1), 1-28.
- Kwon, E. 2001. Infrastructure, Growth, and Poverty Reduction in Indonesia: A Cross-sectional Analysis. *Mimeo*.
- Lesmann, C. 2011. Regional Inequality and Decentralization –An Empirical Analysis. *Technische Universitat Dresden*.
- Lin, B. Q. 1993. Economic Growth, Income Inequality, and Poverty Reduction in People's Republic of China. *Asian Development Review*, 20 (2), 105-124.

- Litschig, S., & Morrison, K. M. 2013. The Impact of Intergovernmental Transfer on Education Outcomes and Poverty Reduction. *American Economic Journal: Applied Economics*, 5 (4), 206-240.
- Loayza, N., & Rigolini, J. 2016. The Local Impact of Mining on Poverty and Inequality: Evidence from Commodity Boom in Peru. *World Development*, 84 (C), 219-234.
- Mount, F. 2008. *Five Types of Inequality*. Joseph Rowntree Foundation. Tersedia di <https://www.jrf.org.uk/report/why-do-people-think-inequality-worse-poverty>, diakses pada 28 November 2017 10.21.
- Pemerintah RI. 2017. *Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017*. Jakarta: Kemenkeu.
- Peragine, V., Palmisano, F., & Brunori, P. 2013. Economic Growth and Equality of Opportunity. *The World Bank Economic Review*, 28 (2), 247-281.
- Ravallion, M., & Datt, G. 2001. Why has Economic Growth been more Pro Poor in some States of India than Others. *Journals of Development Economics*, 68, 381-400.
- Ravallion, M., Chen, S. 2003. Measuring Pro-poor Growth. *Economic Letters*, 78 (1), 93-99.
- Ravallion, M. 2004. Defining Pro Poor Growth: a Response to Kakwani. *International Poverty Center*, 4.
- . 2005. Inequality is Bad for The Poor. *World Bank Policy Research Working Paper*, 3677.
- Sachs, J. D., & Warner, A. M. 2001. The Curse of Natural Resources. *European Economic Review*, 45 (4-6), 827-838.
- Seetanah, B., Ramessur, S., & Rojid, S. 2009. Does Infrastructure Alleviate Poverty in Developing Countries. *International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies*, 6 (2).
- Son, H. H. 2003. A Note on Pro Poor Growth. *Economic Letters*, 82, 307-314.
- Son, H. H. 2007. *Pro-Poor Growth: Concept and Measure*. Manila: Asian Development Bank.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. 2014. *Economic Development 12th Edition*. Harlow: Pearson Education.
- Warr, P. 2006. Poverty and Growth in Southeast Asia. *ASEAN Economic Bulletin*, 23, 279 – 302.
- World Bank. 2000. *World Development Report 2000/ 2001 Attacking Poverty*. New York: Oxford University Press, Inc.
- . 2007. *Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: World Bank.
- . 2016. *Ketimpangan yang Semakin Lebar*. Jakarta: World Bank.
- . 2017. Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Oktober 2017: Menutup Kesenjangan
<http://www.worldbank.org/in/country/indonesiapublication/indonesia-economic-quarterly-october-2017>
- Zaman, K., & Ahmed, M. 2008. An Investigation for Pro-poor Growth Index in Agriculture Sector of Pakistan 1985-2005. *International Journal of Rural Management*, 4 (1), 201-212.